BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, timah, minyak dan gas bumi, batubara, mineral dan lain-lainnya. bahan galian dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung roh yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum Indonesia harus dipergunakan hanya untuk kemakmuran rakyat. Jadi disini ketentuan Pasal 33 ayat (3) mengandung unsur makna antara lain :

- a. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang dipermukaan maupun di bawah tanah sebagai objek
- b. Unsur negara sebagai subjek
- c. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam.

Seluruh kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai Negara, artinya setiap orang baik kelompok, lembaga, atau badan usaha apa pun apabila mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tersebut, tanpa seizin Negara masuk dalam wilayah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan ini terhadap kegiatan yang tidak memperoleh legalitas disebut kegiatan illegal. Beberapa istilah perbuatan illegal yang dikenal seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*, yaitu suatu

perbuatan dan/atau tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa mempunyai legalitas dari Negara.

Dalam konteks pengelolaan kekayaan alam khususnya sumber daya mineral, rakyat menepati dua posisi yakni rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek dan objek. Kedudukan rakyat sebagai objek yaitu rakyatlah yang pertama-tama menjadi sasaran utama untuk menerima manfaat dan hasil kekayaan alam, guna mencapai taraf kehidupan sejahtera dalam arti luas, yakni rakyat memperoleh jaminan social, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain yang salah satunya dibiayai dari hasil kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Sedangkan kedudukannya sebagai subjek yaitu rakyat mempunyai hak yang sama dengan lembaga usaha lain, dalam mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkannya secara bijaksana. Wujud konkret rakyat dalam memanfaatkan bahan galian adalah rakyat diberikan kesempatan untuk ikut mengusahakan bahan galian yang ada, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis penambangan yang baik dan keseimbangan lingkungan.

Hak menguasai Negara di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tentang pengertian dan ruang lingkup terkait hak menguasai Negara tidak ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang ada dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan makna hak menguasai dari Negara, yaitu wewenang untuk :¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari Negara ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII, 2002) hal. 231

ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.² Negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikatakan bahwa dalam hal penguasaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.³

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, maka kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan (KP), kontrak karya, perjanjian kerja penguasaan pertambangan (PKP2B), dan kontrak production sharing.⁴

Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK).

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru mengatur tiga bentuk izin namun dalam undang-undang ini masih mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 169 yakni :⁵

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukannya sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak

² AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung : Mandar Maju, 1989) hal. 3

³ UU No. 11 Tahun 1967

⁴ Irwan Prayitno, *Masa Depan Industri Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah*, Disajikan pada Diskusi Pertambangan Kongres Ikatan Alumni ITB Bandung, 29 Juni 2001, hal. 21

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru

undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara.

- c. Pengecualian terhadap penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan Negara.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah perubahan system perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, system yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah menggunakan kontrak, baik kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menggunakan izin. Izin yang diberikan kepada pemohon, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR dan IUPK.

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁶ Walaupun dalam undang-undang ini telah ditetapkan system yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral yakni IUP, namun dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap mengakui keberadaan kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini sampai jangka waktu berakhirnya kontrak karya.

Contohnya adalah kontrak karya yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kontrak ditandatangani tanggal 2 Desember 1986 dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2000. Mulai dihitung berlakunya kontrak karya adalah pada saat berproduksi secara komersial. Jangka waktu berlakunya kontrak adalah 30 tahun.⁷

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang perlu disesuaikan meliputi :

- a. Pemurnian harus dilakukan di dalam negeri
- b. Menyampaikan rencana kegiatan, dan
- c. Menyetorkan keuntungan yang diperolehnya.

⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 3 ayat (1)

Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan PKP2B dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Di samping itu, pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana mencakupi kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK untuk menyampaikan laporan atau keterangan baik yang berkaitan dengan :

- a. Ditemukannya mineral atau batubara yang tergalai,
- b. Mengelola lingkungan hidup
- c. Menyampaikan laporan tentang penjualan mineral dan batubara
- d. Menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja dan
- e. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Industri pertambangan adalah industri yang sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi hingga konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan penduduk lokal. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa, Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining, Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana, Meares Sopotan Mining, Nusa Halmahera Mineral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain.

Konflik antara penduduk dengan industri pertambangan berkisar pada perampasan tanah, pencemaran lingkungan dan juga perebutan wilayah pertambangan. Konflik wilayah pertambangan banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tercatat empat kampung telah digusur Di Kelian, Kalimantan Timur, karena wilayah itu diizinkan negara untuk PT. KEM milik Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Ribuan orang kehilangan hak menambang di Barito Utara karena kawasan mereka dikuasai oleh PT. IMK milik Aurora Gold yang berkantor pusat di Australia. Dari segi lingkungan hidup, tercatat miliyar kubik limbah tambang (Tailing dan Overburden telah dibuang oleh Freeport, Newmont, IMK, KEM dll). Akibatnya sungai, laut, dan air tanah penduduk tercemar oleh limbah tersebut dan telah menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius.

Hingga kini masih banyak konflik antara penduduk lokal dengan industri yang tidak terselesaikan. Pemerintah sering kali lebih mendukung perusahaan daripada penduduk lokal. Hal itu disebabkan pandangan negara yang legalistik dan formalistik. Akibatnya negara terus melindungi kepentingan investasi yang telah diizinkan. Rasa keadilan rakyat tidaklah menjadi prioritas untuk penegakan hukum. Kini lebih dari 35% total daratan Indonesia telah diberikan pada 1.194 Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya, dan 257 PKP2 Batubara. 85% konsesi minyak dan gas telah diberikan pada perusahaan asing dan hanya 15% yang masih dikuasai oleh Pertamina. Tidak heran jika setiap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan, selalu saja intervensi negara-negara utara begitu terasa dan nyata. Lihat bagaimana Duta Besar Amerika datang ke Mabes Polri ketika Direktur Newmont Minahasa Raya di dakwa melakukan kejahatan lingkungan hidup.⁸

I.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan pengaturan ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah konsepsi hak menguasai oleh negara atas pertambangan mineral dan batubara ?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran ketentuan pertambangan mineral dan batubara khususnya kegiatan eksplorasi yang merugikan masyarakat umum?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap ketentuan dan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku, adalah :

⁸ Ageng, Ivan Valentina berjudul : *Pengalaman Advokasi Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam*, <http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html>, diakses pada 22 Mei 2015

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas perkembangan ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep “hak menguasai oleh Negara” atas pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam bumi Indonesia.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebibakan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan yang meliputi kontrak karya, perjanjian karya pertambangan, dan izin pertambangan rakyat.

I.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan berpikir tentang kajian yuridis atas pertambangan mineral dan batubara, kajian normatifnya, dan kajian empiris serta pengaturan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.
- b. Penelitian ini pun berguna untuk memberikan pemahaman atas konsepsi hak menguasai oleh Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu analisis atau kajian terhadap sengketa, termasuk sengketa di bidang pertambangan mineral dan batubara maka, beberapa teori yang dapat diterapkan sebagai landasan penelitian atau kajian adalah :

- a. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling

utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann, dikatakan bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum".⁹ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa "mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama."¹⁰ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membeda-bedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi, namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Di dalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata.

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke 21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah :

- 1) Adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan

⁹ Friedman Wolfgang, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, (Susunan I), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, (Jakarta, CV. Rajawali, 1990), hal : 130

¹⁰*Ibid*

- 2) Adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat:¹¹

“struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik “

Dari teori keadilan tersebut menunjukkan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan, kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

b. Teori Konflik.

Teori konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sengketa atau konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Teori konflik dimaksud adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, dan Simon Fisher.¹²

Teori konflik berorientasi kepada struktur dan institusi sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik menganalisis konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan

¹¹ <http://www.sydney.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

¹² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta : Prenada, 2007) hal. 153-154

yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan. Sementara teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.¹³

Dalam menganalisis faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dengan PT. NNT adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Simon Frazier, yang mengemukakan 6 (enam) teori yang mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa, yang meliputi teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi konflik dan teori kebutuhan manusia.¹⁴ Teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Teori Hubungan Masyarakat berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih dapat saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
- 2) Teori negosiasi, berprinsip bahwa penyebab terjadinya konflik adalah disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Jadi sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
 - b) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

¹³*Ibid*, hal. 153

¹⁴ Imam Taufik, *Relasi Negara dan Masyarakat Dalam Diskursus Konflik di Indonesia dalam Mengelola Konflik Membangun Damai Teori, Strategis dan Implementasi Resolusi Konflik*, Editor Mukhsin Jamil, (Semarang : WMC dan IAIN Walisongo, 2007) hal. 155

- 3) Untuk teori kesalahpahaman, khususnya antar budaya berasumsi bahwa konflik terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda-beda. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - a) Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
 - b) Mengurangi stereotif negative yang mereka miliki tentang pihak lain.
 - c) Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
 - 4) Teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya an ekonomi. Dan sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah :
 - a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
 - b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan
 - c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsialiasi dan pengakuan.
 - 5) Teori kebutuhan manusia, berasumsi bahwa penyebab terjadinya konflik adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Dan sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.
 - b) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- c. Teori Penyelesaian Sengketa.

Teori penyelesaian sengketa dikemukakan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Mereka mengemukakan strategi penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- 2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- 4) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) *Inaction* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dengan melihat teori-teori yang melandasi penelitian terkait dengan sengketa pertambangan mineral dan batubara tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sendiri harus mendasari pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum pertambangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, dan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas manfaat merupakan asas dimana didalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).¹⁵ Konsep *utility* yang dikembangkan Jeremy Bentham adalah untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat bangsa. Masyarakat dapat diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani

¹⁵ W. Friedman, *Legal Theory*, (London : Stevens & Sons Limited, 1960) hal. 268

kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin.

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan investor.

Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Ujung peran serta masyarakat yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, atau dapat menjadi pengusaha maupun distributor.

Asas transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja dan lainnya.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

I.5.2 Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan kajian terhadap pertambangan mineral dan batubara maka perlu dipahami beberapa konsep terkait dengan mineral dan batubara itu sendiri. Istilah mineral yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu “mineral”, dalam Undeveloped Mineral Areas Act 2006 Kanada dirumuskan pengertian mineral sebagai *“Includes a naturally occurring inorganic substance both metallic and non-metallic, and includes quarry materials and salt, and also incules coal, oil and natural gas.”*¹⁶

Pengertian mineral dalam definisi ini sangat luas karena tidak hanya mineral sebagai bahan organis, tetapi juga yang mencakup :

- a. Metalik dan non metalik
- b. Batubara, serta
- c. Minyak dan gas bumi.

Sedangkan dalam Seksi 3 huruf aa the Philippine Mining Act of 1995 telah dijelaskan pengertian mineral, yakni :

Minerals refers to all : naturally accuring inorganic substance in solid, gas, liquid, or any intermediate state excluding energy materials such as coal, petroleum, natural gas, radiocactive materials, and geothermal energy.

Dari definisi diatas terlihat bahwa tidak hanya didefinisikan tentang pengertian mineral semata-mata tetapi juga penggolongan mineral. Mineral dikonstruksikan sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah. Dan mineral digolongkan menjadi :

- a. Solid (benda padat)
- b. Gas.

¹⁶ Section 2 huruf c Undeveloped Mineral Areas Act 2006 Kanada

- c. Liquid (cairan)
- d. Batubara
- e. Minyak bumi
- f. Gas alam cair
- g. Radioaktif
- h. Energy geothermal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mineral diartikan sebagai “benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelican.¹⁷ Sedangkan Batubara adalah “arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.”¹⁸

Agar lebih dipahami maka definisi konsep atas mineral dan batubara serta hal lain yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, antara lain :

- a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁹
- b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padat.²⁰
- c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.²¹
- d. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.²²

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hal. 584

¹⁸*Ibid*, hal. 86

¹⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

- e. Sengketa tambang adalah sengketa atau konflik atau pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab dimana antara bab satu dengan lainnya saling terkait dan memberikan jawaban atas permasalahan tesis ini. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II Kajian Pustaka Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab ini menguraikan tentang konstitusi, selanjutnya hak menguasai negara, yang terdiri dari sub subbab dasar hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan, pengertian hak menguasai negara, pengertian hak menguasai negara menurut undang-undang pokok agraria, putusan mahkamah konstitusi, sub bab selanjutnya menguraikan tentang teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dan sub bab terakhir menguraikan mengenai ruang lingkup penguasaan negara dalam bidang pertambangan.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri atas subbab Tipe Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian, Pengelolaan dan Analisis Bahan Penelitian.

Bab IV Pembahasan, yang menguraikan dan menganalisis jawaban atas rumusan masalah penelitian ini yakni. subbab pertama mengenai peraturan perundang-undangan pertambangan di Indonesia, sub bab kedua menganalisis konsepsi hak menguasai oleh negara atas pertambangan mineral dan batubara dan subbab terakhir menganalisis kebijakan hukum pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bab V Penutup. Merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis bagi para pembaca.

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 29 dan 30